

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian .

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. Air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah.

Menurut Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 1 ayat 9 Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dalam peraturan yang sama dengan di atas pada Paragraf 4 Pemanfaatan, Pemulihan dan Konservasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS Pada Kawasan Lindung dan Budidaya pasal 29 :

1. Pelaksanaan pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi pengelolaan DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan

budidaya dengan tetap memperhatikan kriteria teknis dan kelestarian DAS serta fungsi morfologi DAS bagian hulu sampai dengan bagian hilir secara utuh.

2. Pola pemanfaatan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi pengelolaan DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya guna menjamin pembangunan berkelanjutan.

Salah satu sub DAS yang terletak di Kota Bandung adalah sub DAS Cikapundung. Sungai Cikapundung memiliki panjang 28 kilometer yang membelah Kota Bandung, mata air yang berhulu di Gunung Bukit Tunggul kemudian melewati 9 kecamatan yakni Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Cicendo, Sumur Bandung, Regol, Lengkong, Margacinta dan Bandung Kidul serta mencakup 13 kelurahan dan berakhir di Sungai Citarum. Total daerah wilayah sungai sekitar 154 kilometer persegi atau 15,400 hektar. Dimana pemanfaatan air Sungai Cikapundung dapat lebih dikembangkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air, di samping sumber-sumber lainnya.

Sungai Cikapundung memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi perkembangan Kota Bandung, karena sungai ini berfungsi sebagai sumber air baku bagi Kota Bandung. Kawasan Sungai Cikapundung sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung pada pasal 72 disebutkan antara lain :

1. KSK Sungai Cikapundung, sebagai kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
2. Lokasi KSK Sungai Cikapundung adalah koridor Sungai Cikapundung dan sekitarnya beserta sempadannya, mulai dari PLTA Bengkok di bagian utara sampai batas Tol Padaleunyi di bagian selatan.
3. Pengembangan KSK Cikapundung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sungai Cikapundung dalam pemanfaatannya, berfungsi sebagai (1) drainase utama pusat kota; (2) objek wisata Bandung (Maribaya, Curug Dago, kebun binatang dll); (3) penyedia air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung yang membangun instalasi penyadapan di Dago Pakar, Dago, dan di Badak Singa; (4) pemanfaatan energi yang dikelola oleh PT Indonesia Power-Unit Saguling yang mendirikan instalansi di PLTA Bengkok dan PLTA Dago Pojok, serta (5) sebagai sarana irigasi pertanian, namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, instalasi tersebut tidak berfungsi secara efektif. (Sumber: Efektivitas Kelembagaan Partisipatoris di Hulu Daerah Aliran Sungai Citarum, Siti Halimatusadiah).

Hulu Sungai Cikapundung juga merupakan sumber air baku bagi penduduk Bandung. PDAM Tirtawening Kota Bandung mengolah sekitar 2,700 liter air per detik. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dago Pakar mengolah sekitar 600 liter air yang disuplai dari Bantar Awi. Sedangkan IPA Badak Singa mengolah 400 liter

air/detik dari intake Dago Bengkok. Selain air minum, Sungai Cikapundung juga memiliki pembangkit listrik tenaga air. Tenaga listrik dihasilkan dengan memanfaatkan kekuatan gravitasi air dari air terjun atau arus air. Pembangkit listrik tenaga air di Sungai Cikapundung ini dibangun di Jaman Pemerintah Belanda pada tahun 1923. Ada dua pembangkit yaitu di Bengkok (3 x 1050 KW) dan Dago (1x 700 KW). Menurut data PSDA Jawa Barat, Sungai Cikapundung juga digunakan untuk irigasi, terutama di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

Sebagai penggelontor kotoran dan pembuangan limbah domestik maupun industri sampah kota; melalui bendung-bendung yang ada termasuk di atas. Awalnya Sungai Cikapundung berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian. Sebagai Obyek wisata: Di sekitar Sungai Cikapundung terdapat lokasi wisata yang banyak dikunjungi dimana salah satunya adalah Curug Dago yang di dalamnya terdapat Situs Thailand.

Pelaksanaan pemanfaatan sungai merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan sungai juga dalam rangka tugas pembantuan yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengusahaan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Pasal 124 disebutkan antara lain :

1. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang kota yang ditetapkan oleh Walikota
2. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

Selama ini Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan DAS Cikapundung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok 'Melaksanakan kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan sumber daya air'. Sedangkan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan antara lain :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air;
2. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapanya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur Sungai termasuk bangunan pelengkapanya; bendung, bangunan pembangi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum. Sementara dalam

operasioalnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Pasal 37 :

(1) UPT Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang pengendalian daerah aliran sungai. .

Namun harapan pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan DAS Cikapundung sebagai salah satu Kawasan Strategis Kota (KSK) belum bisa terwujud. Dimana pada saat ini, pemanfaatan air sungai Cikapundung sudah berkurang. Berdasarkan hasil penjajagan awal melalui observasi peneliti menemukan adanya beberapa indikasi yang menunjukkan berkurangnya Pemanfaatan DAS Sungai Cikapundung di Kota Bandung sebagai berikut :

1. Adanya pencemaran terhadap lingkungan permukiman warga di sempadan Sungai Cikapundung air sungai jadi tercemar yang disebabkan oleh pembuangan sampah maupun limbah rumah tangga ke dalam sungai tersebut. Pemukiman yang padat serta tercemarnya air sungai, menandakan kerusakan lingkungan Sungai Cikapundung oleh faktor manusia. Hal ini juga menandakan manusia dan alam berada dalam krisis ekologi berupa 'keterpisahan' antara manusia dan alam. Manusia berada dalam alam dan terikat serta tergantung dari alam dan seluruh isinya

2. Peningkatan eksploitasi ruang dan sumber daya air berakibat karena tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk. Perubahan hutan di hulu Sungai Cikapundung menjadi ladang, pemukiman, dan perkebunan tanpa adanya pengendalian dalam pemanfaatannya dapat menyebabkan banyaknya lahan kritis, erosi yang semakin tinggi, sehingga mengakibatkan sedimentasi di sungai, waduk, jaringan drainase dan prasarana keairan lainnya.
3. Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan meningkat dari tahun ke tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitasnya. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin berkurang dan mempunyai kecenderungan menjadi semakin terbatas. Apabila hal ini tidak diantisipasi, maka akan timbul ketegangan akibat terjadinya benturan kepentingan manakala permintaan (*demand*) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhannya (*supply*).
4. Tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap DAS Cikapundung dirasakan masih rendah.

Dari beberapa indikasi tersebut di atas, memperlihatkan bahwa Pemanfaatan DAS Cikapundung Kota Bandung belum optimal.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan disegala bidang senantiasa memerlukan kepentingan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan efektif, dalam rangka keberhasilan untuk mewujudkan

suatu lembaga pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi nyata dengan didasarkan pada upaya mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung. Terkait dengan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung, pengendalian merupakan hal yang penting dan mendasar bagi suatu lembaga dalam menjalankan suatu proses pelaksanaan tugas yang terarah dan jelas.

Pentingnya pengendalian dalam mengatasi masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, karena pengendalian merupakan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Dengan demikian mekanisme bekerja berjalan semakin jelas sehingga rencana organisasi, tujuan organisasi, sumber daya organisasi dan struktur dasar organisasi dapat terdefinisikan bahkan dapat diimplementasikan secara tepat dan hal itu akan dapat mendorong pada efektifnya pencapaian tujuan maupun hasil kerja yang sesuai dengan rencana melalui upaya pengendalian pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung.

Berdasarkan masalah tersebut di atas diduga, disebabkan oleh beberapa faktor dari pelaksanaan pengendalian belum berjalan secara optimal oleh lembaga yang mengelola Sungai Cikapundung Kota Bandung

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengendalian pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul: **“Pengendalian Dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung (Studi Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap Pengendalian dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung (Studi Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung)

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk membuat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengendalian dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung?
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pengendalian dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung di Kota Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengendalian dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengendalikan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membawa manfaat untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya dalam kajian manajemen pemerintahan. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk melakukan kajian selanjutnya secara mendalam.

2. Kegunaan Praktis:

Hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai dasar masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung.